

**ANALISIS PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN SOLOK**

TESIS

Oleh:

HAMDANI HASNAM
06202028



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**



ANALISIS PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN SOLOK

Oleh : Hamdani Hasnam

(Di bawah bimbingan Dr. Afrizal, MA dan Drs. Bakaruddin RA, MS)

Ringkasan

Tesis ini membahas bagaimana upaya Pemkab Solok membangun sinergi antara tiga domain good governance yaitu Pemda, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Solok, dengan studi kasus objek wisata Danau Kembar. Tema ini penting dikaji karena pariwisata merupakan salah satu andalan Kabupaten Solok dalam rangka peningkatan PAD. Namun sejauh ini, pengelolaan pariwisata belum optimal, partisipasi masyarakat dan swasta masih sangat minim sehingga kontribusinya bagi peningkatan PAD Kabupaten Solok, masih sangat kecil. Pada tahun 2006 saja, pariwisata hanya menyumbang 0,83 % terhadap total PAD Kabupaten Solok.

Untuk kebutuhan kerangka teori digunakan teori *good governace* dan konsep pariwisata. Secara teoritis, sinergi tiga domain *good governance* merupakan jalan untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor publik, termasuk pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkab Solok belum berhasil membangun sinergi tiga domain *good governance* dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Solok, sehingga partisipasi swasta dan masyarakat minim. Arah kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat sudah ada, namun bentuknya belum tepat sesuai konsep good governance. Masyarakat dan swasta belum dilibatkan dalam seluruh fase pengembangan kepariwisataan, sehingga belum terbangun kesatuan paradigma pengembangan pariwisata sebagai tanggung jawab dan kebutuhan bersama.

ANALISIS PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN SOLOK

Oleh : Hamdani Hasnam

(Di bawah bimbingan Dr. Afrizal, MA dan Drs. Bakaruddin RA, MS)

Ringkasan

Tesis ini membahas bagaimana upaya Pemkab Solok membangun sinergi antara tiga domain *good governance* yaitu Pemda, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Solok, dengan studi kasus objek wisata Danau Kembar. Tema ini penting dikaji karena pariwisata merupakan salah satu andalan Kabupaten Solok dalam rangka peningkatan PAD. Namun sejauh ini, pengelolaan pariwisata belum optimal, partisipasi masyarakat dan swasta masih sangat minim sehingga kontribusinya bagi peningkatan PAD Kabupaten Solok, masih sangat kecil. Pada tahun 2006 saja, pariwisata hanya menyumbang 0,83 % terhadap total PAD Kabupaten Solok.

Untuk kebutuhan kerangka teori digunakan teori *good governace* dan konsep pariwisata. Secara teoritis, sinergi tiga domain *good governance* merupakan jalan untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor publik, termasuk pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkab Solok belum berhasil membangun sinergi tiga domain *good governance* dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Solok, sehingga partisipasi swasta dan masyarakat minim. Arah kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat sudah ada, namun bentuknya belum tepat sesuai konsep *good governance*. Masyarakat dan swasta belum dilibatkan dalam seluruh fase pengembangan kepariwisataan, sehingga belum terbangun kesatuan paradigma pengembangan pariwisata sebagai tanggung jawab dan kebutuhan bersama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata adalah salah satu penjabaran dari tiga bidang titik berat program kerja Kabupaten Solok, yaitu penjabaran dari bidang ekonomi kerakyatan.¹ Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Solok diharapkan oleh pemerintah Kabupaten dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang memadai. Kebijakan ini diambil mengingat besarnya peluang pengembangan pariwisata di Kabupaten Solok yang memiliki cukup banyak objek wisata baik wisata alam, budaya, dan minat kreasi.² Wisata alam saja memiliki 75 tempat wisata yang tersebar di 14 kecamatan. Diantara sejumlah objek wisata tersebut terdapat danau kembar yaitu Danau Diatas dan Danau Dibawah. Danau kembar ini merupakan salah satu objek andalan (pilar pariwisata), karena potensinya sangat mendukung untuk dijadikan objek wisata.³

Diterapkannya sistem pemerintahan otonomi daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tantangan besar bagi setiap daerah untuk mampu mengembangkan diri secara lebih mandiri. Hal ini disebabkan otonomi daerah memberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola tata pemerintahan sendiri termasuk sumber daya-sumber daya yang dimiliki kepada daerah, kecuali untuk urusan yang merupakan urusan pemerintah

¹ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok tahun 2006-2010.

² Dokumentasi potensi wisata di kabupaten Solok dapat dilihat dalam berbagai sumber, antara lain Renstra SKPD tahun 2006-2010, dan beberapa buku hasil pencatatan lapangan yang diterbitkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok.

³ Dinas Pariwisata Kabupaten Solok, Proposal Pengelolaan Danau Kembar Resort tahun 2003. Dinas Pariwisata Kabupaten Solok.

pusat.⁴ Salah satu bentuk kemandirian itu adalah kemampuan finansial yang akan mendukung pembangunan daerah. Artinya, daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai kebutuhan daerahnya, tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah adalah ciri utama yang menunjukkan kemampuan daerah otonom untuk menjalankan otonominya.⁵

Fenomena yang umum terjadi menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini juga terjadi di Kabupaten Solok. Meskipun ekonomi Kabupaten Solok menunjukkan perbaikan pada periode 2000-2004 dengan pertumbuhan ekonomi 4,63 %, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi propinsi yang sebesar 4,12 %, namun permasalahan kemiskinan masih tinggi bahkan menempati posisi kedua daerah berpenduduk miskin terbanyak di Sumatera Barat. Realisasi PAD masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 40 %. Kontribusi PAD terhadap pendapatan total hanya sebesar 4,89 %, selebihnya berasal dari dana perimbangan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.⁶ Oleh karena itu, otonomi daerah menuntut kreatifitas pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan segala potensi yang ada di daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan pada akhirnya meningkatkan PAD.

⁴ Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Hossel Nogi S. Tangkilisan, 2005. Manajemen Publik, Jakarta: PT. Grasindo. Hal. 72.

⁶ Dokumen RPJM Kabupaten Solok tahun 2006-2010.

BAB VI PENUTUP

I. KESIMPULAN

Pariwisata merupakan sektor unggulan kedua di Kabupaten Solok, yang merupakan penjabaran dari salah satu pilar pembangunan Kabupaten Solok yaitu ekonomi kerakyatan. Sebagai sektor unggulan, pariwisata diharapkan mampu memberikan andil besar bagi PAD Kabupaten Solok yang sampai saat ini masih sangat kecil kontribusinya bagi pendapatan total Kabupaten Solok. Oleh karena itu, upaya pengembangan pariwisata terus dilakukan, diantaranya dengan menetapkan tiga objek wisata unggulan; Danau Singkarak, Danau Kembar dan Kawasan Arosuka.

Kawasan Danau Kembar memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sesuai dengan tujuan tersebut. Namun, pengembangan kawasan ini tidaklah pekerjaan mudah. Dari segi pendanaa saja, idealnya dibutuhkan dana sebesar 10 miliar untuk menuntaskan pembangunan kawasan Danau Kembar. Dokumen kunci pengelolaan pariwisata Kabupaten Solok adalah Renstra Disparbud Kabupaten Solok tahun 2006-2010, yang dibuat dengan memedomani RPJMD Kabupaten Solok tahun 2006-2010. Dokumen inilah yang diturunkan dalam rencana kerja tahunan dan evaluasinya dilaporkan dalam LAKIP.

Dari LAKIP tahun 2005-2007 diperoleh keterangan bahwa sebagian besar program telah terlaksana dengan baik, kecuali satu kegiatan yang selalu gagal dalam tiga tahun tersebut yaitu Festival Danau Kembar. Kegagalan kegiatan ini disebabkan permasalahan utamanya adalah permasalahan dana. Meskipun

terkategori program sudah berhasil, namun pencapaian pengembangan pariwisata belum memadai. Kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata sebagai sektor unggulan terhadap realisasi PAD Kabupaten Solok hanya sebesar 0,6 %.

Dari hasil kajian dokumentasi dan wawancara diperoleh kesimpulan bahwa salah satu penyebab utama belum optimalnya pengelolaan pariwisata ini disebabkan masih sangat minimnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta. Dari program kerja yang ada, upaya untuk menarik minat investor masih sedikit dan bentuknya juga kurang tepat. Program meningkatkan partisipasi swasta baru berupa penyuluhan dan penilaian terhadap restoran dan rumah makan. Demikian juga partisipasi masyarakat baru sebatas keterlibatan dalam penampilan seni budaya daerah, sementara peningkatan perekonomian masyarakat setempat belum banyak diperhatikan. Masyarakat dan swasta belum dilibatkan dalam keseluruhan fase pengelolaan kepariwisataan. Akhirnya, "paradigma tanggung jawab bersama" dalam pengembangan pariwisata sebagai sektor riil pilar pembangunan ekonomi kerakyatan, belum tercipta.

Selain program yang masih kurang menyentuh sasaran, kondisi ini juga didukung sifat yang berlaku umum dalam masyarakat Minangkabau yang dikenal berciri komunal. Dalam masyarakat seperti ini, perasaan kebersamaan sangat diperhatikan, sehingga kemauan untuk bekerja sama dan bahu membahu melakukan suatu kerja tergantung pada kemampuan untuk membangun rasa kepemilikan bersama.

Untuk itu, ke depan Pemkab Solok perlu membuat terobosan-terobosan baru untuk mengikat masyarakat dan swasta dalam pengembangan pariwisata.

Sebab jika tidak, pencapaian pariwisata sebagai sektor pilar ekonomi kerakyatan akan sulit diwujudkan. Sebab, baik Disparbud, DPRD maupun pihak-pihak lainnya, sama-sama mengakui keterbatasan Pemkab untuk mengelola sepenuhnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Solok.

II. REKOMENDASI

Dari kajian penelitian, diperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut:

A. Secara umum

- Reorientasi konsep pengelolaan kepariwisataan di lingkungan Disparbud yang berpedoman pada konsep good governance pada semua level.
- Membuat perencanaan terpadu lintas SKPD untuk pengembangan kawasan wisata andalan, sehingga lebih realistis untuk segera dilaksanakan.
- Membuat sebuah wadah komunikasi dan koordinasi semacam forum bersama secara berkala tempat bertemunya elemen-elemen yang berhubungan dengan pariwisata dari 3 pilar good governance.

B. Terkait peningkatan partisipasi swasta

- Menata ulang hubungan dengan swasta, khususnya calon investor daerah dalam rangka membangun kesamaan visi pengembangan pariwisata di Kabupaten Solok. Sedapatnya calon investor dilibatkan dalam seluruh fase pengelolaan pariwisata sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Mengintensifkan jejaring kepada pihak swasta yang potensial untuk investasi, misalnya forum-forum diskusi berkala dengan persatuan pengusaha dan lainnya.
- Mengupayakan keterlibatan investor untuk penyelesaian pembangunan kawasan Danau Kembar dan pelaksanaan even Festival Danau Kembar. Dari pengalaman yang ada, alokasi dana total dari APBD untuk mencapai target cukup riskan dilakukan.

C. Terkait peningkatan partisipasi masyarakat

- Menyelesaikan segera permasalahan pembebasan lahan dengan duduk bersama antar pihak terkait.
- Meningkatkan perhatian untuk pemberdayaan/peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alsa, Asmadi, 2003. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikoloci, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andy Fefta Wijaya, "Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Era Good Governance dan Otonomi Daerah dalam Jurnal ilmiah Administrasi Publik Vol. VIII No. 2 Maret-Agustus 2007.
- Bungin, Burhan (ed.), 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- D., Riant Nugroho, 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dwiyanto, Agus, 2005. *Mewujudkan Good Governnace Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: UGM Press.
- Faisal, Sanapiah, 1990. *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.
- Kaho, Josep Riwu, 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kweit, Mary Grisez dan Robert W. Kweit , 1986. *Konsep dan Analisis Metode Politik*. Jakarta : Bina Aksara
- LBH Padang, 2005. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA; Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan*, Padang: LBH Padang.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muchtar dan Erna Widodo, 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Avyroz: Jakarta.
- Mulyana, Deddy, cet. 2, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pitana, I Gde dan Putu G. Gayatri, 2005. *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: Andi.